



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULIADI TUTUPOHO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 487892

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.013 m²/320 m² di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 184 m² di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.500.000

1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR R2/SPM Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.405.031

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.272.205.031

III. HUTANG Rp. 177.485.166

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.094.719.865

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.